

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN



RENSTRA 2016-2021

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020**



MURA SEMPURNA 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu :

1. Berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.
2. Berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan.
3. Mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan pedesaan.
4. Penyediaan data dan informasi penduduk.
5. Penyerasian kebijakan kependudukan.

BKKBN Pusat merupakan lembaga non kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Indonesia. Untuk dapat memperkuat implementasi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan yang didahului dengan penajaman pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) BKKBN 2015-2019 yang diupayakan mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita. BKKBN turut berperan untuk mewujudkan agenda nomor 5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” dan memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan prioritas kesehatan dan revolusi mental dengan memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masuk dalam klasifikasi urusan wajib non-pelayanan dasar. Ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan ini diatur dalam Pasal 11 dan 12. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi bagian dari 18 urusan wajib di luar pelayanan dasar.

Khusus sub urusan KB, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas lima aspek, Pemerintah Provinsi dua aspek, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak empat aspek. Pemerintah Provinsi “hanya” berwenang dalam 1) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal; 2) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat tetap bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan pasangan usia subur (PUS) Nasional. Sementara pemerintah Kabupaten dan Kota bertanggung jawab dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Seiring dengan itu pula, maka PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dituntut untuk terus meningkatkan kinerja khususnya dalam urusan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Musi Rawas dan hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pemimpin Daerah seiring dengan VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan dijabarkan melalui Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

Dalam kerangka ini, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas juga telah menyusun rencana kerja tahunan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tertuang dalam RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2016-2021.

Renstra ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berwawasan lima tahun dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan mengacu pada RPJMN dan RPJMD yang meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis berbasis kinerja (PBK) yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD per tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana strategis perubahan ini sudah berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan rencana strategis lima tahunan ini juga merupakan komitmen bersama dari seluruh stakeholder dan pelaksana Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tingkat Kabupaten Musi Rawas yang diturunkan kepada tingkat Kecamatan, tingkat Kelurahan dan Desa, sampai tingkat Dusun/Dukuh/RT yang disosialisasikan dan dikoordinasikan dalam kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun pelaksanaan program guna evaluasi kegiatan tahunan melalui Rakerda (Rapat Kerja Daerah) untuk Tingkat Kabupaten, Rakorcam Untuk Tingkat Kecamatan, Rakordes Untuk Tingkat Desa, Rakordus untuk Tingkat Dusun dan Rakor Untuk Tingkat RT/Dukuh.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844), dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Metri Dalam Negri Republik Indonesia Nomer 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 21. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas;
 22. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Nomor : 22/KPTS/BKB/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Tim Penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi (Pedoman) Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan selanjutnya sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD dan juga sebagai acuan RKA (Rencana Kerja Anggaran) PD yang selaras dengan RAPBD dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Berdasarkan hal tersebut, maka RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD dan APBN
2. Menyediakan satu pedoman dalam menentukan arah pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada kondisi yang nyata dan proyeksi kedepan sebagai pedoman untuk menilai dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja tahunan program.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS), berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS, berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/K abupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN,, berisi tentang Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN , Strategi dan Kebijakan dalam Mencapai Visi dan Misi.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

(Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas)

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS

2.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 adalah :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB) dan kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 terdiri dari :

BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI (Terlampir)

2.2 SUMBER DAYA

a. Susunan Kepegawaian

Susunan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris , membawahkan :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan
 - Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - Seksi Advokasi dan Penggerakan

- Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
4. Bidang Keluarga Berencana
 - Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
 - Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana (KB).
 5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
 - Seksi Ketahanan Remaja.
 6. Bidang Pengendalian Penduduk
 - Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 - Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - Seksi Data dan Informasi.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 8. Kelompok jabatan Fungsional.

b. Sumber Daya Aparatur dan Asset

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas didukung oleh sumber daya aparatur dan aset sebagai berikut :

1. Keadaan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas terdiri dari (data s.d Juli 2020) :
 - a. Tenaga Administratif 33 orang
 - b. Tenaga Administratif Non PNS 08 orang
 - c. Tenaga Administratif Struktural 21 orang
 - d. Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) 147 Orang

Secara rinci keadaan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas termasuk jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Musi Rawas

No	Komposisi Pegawai	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS	Jabatan Struktural/Fungsional
1	2	3	4	5
1.	Tenaga Administratif	33	08	21 Struktural
2.	Tenaga Teknis Fungsional	-	-	- Fungsional
3.	Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	27	120	27 Fungsional
	Jumlah	60	128	188 Orang

Berikut uraian daftar pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jabatan struktural, jabatan fungsional dan jeni kelamin yang disajikan melalui tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jabatan Struktural, jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	
1	Jabatan Struktural	Eselon II	1
		Eselon III	5
		Eselon IV	15
2	Pejabat yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan	Eselon II	5
		Eselon III	13
		Eselon IV	15
3	Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural	Eselon II	1
		Eselon III	5
		Eselon IV	15
4	Jabatan Fungsional	PKB/PLKB	27
5	Staf		12
6	Usia	Usia dibawah 30 Tahun	1
		Usia diatas 30-40 Tahun	14
		Usia diatas 41-50 Tahun	7
		Usia diatas 50 Tahun	38
7	Pendidikan	Strata 2	1
		Strata 1	35
		Sarjana Muda	3
		SMA	20
		SMP	1
		SD	-
8	Jenis Kelamin	Laki-laki	29
		Perempuan	31

2. Aset yang dikelola

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki berbagai sarana dan prasarana.

Adapun sarana untuk menunjang kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

❖ Ruang Kantor

Gedung Pusat Administrasi sudah cukup memadai sebagai ruang kerja dan juga terdapat ruang-ruang kerja antara lain: ruang perpustakaan, Balai penyuluh KB, gudang alkon, cukup memadai, namun sarana prasarana seperti komputer, LCD dan ATK masih perlu penambahan.

❖ Kendaraan Operasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas memiliki sarana transportasi berupa :

Kendaraan dinas roda empat sebanyak 4 unit terdiri dari:

- 1 Unit Mini Bus Merk Toyota Kijang Avanza
- 1 Unit Mini Bus Merk Toyota Kijang Kapsul
- 1 Unit Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB jenis Bus Engkel
- 1 Unit Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB jenis Bus
- 1 Unit Mobil Unit Penerangan (MUPEN) jenis Double Cabin
- 1 Unit Mobil Akseptor
- 1 Unit Mobil Distribusi Alkon

Sedangkan kendaraan operasional roda dua sebanyak 64 unit, terdiri dari :

- 2 Unit Sepeda Motor Honda Mega Pro
- 62 Unit Sepeda Motor Honda untuk Penyuluh KB

Mengingat Volume tugas dan beban kerja yang padat dan kompleks maka kendaraan operasional yang dimiliki sekarang ini masih dirasakan sangat kurang dan perlu penambahan untuk menunjang mobilitas para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian.

2.3 KINERJA PELAYANAN

Pada prinsipnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) diharuskan memiliki Rencana Strategis (Renstra). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas ditujukan dalam upaya melaksanakan Misi 1 (Kesatu) RPJMD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu : Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan urusan pemerintahan daerah pendukungnya yang mengarah pada sasaran strategis meningkatnya pengendalian penduduk melalui KB menuju keluarga sejahtera dengan indikator kinerja utama persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KB yang terbagi kedalam beberapa indikator, yaitu :

1. Tingkat prevalensi peserta KB Aktif : meningkatnya jumlah seluruh peserta kb aktif per tahun;
2. Tingkat prevalensi kesertaan KB Pria : meningkatnya jumlah seluruh peserta kb aktif per tahun;
3. Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) : menurunnya rasio unmet need per tahun;
4. Total Fertility Rate (TFR) : menurunnya jumlah anak yang akan dimiliki wanita usia subur (WUS) dalam masa reproduksinya per tahun;
5. Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja : meningkatnya jumlah PIK Kespro Remaja dalam rangka PUP (Pendidayaan Usia Perkawinan);
6. Bina Keluarga Balita : meningkatnya jumlah kelompok BKB per tahun;
7. Rata-rata jumlah anak per keluarga : menurunnya jumlah anak per keluarga per tahun;
8. Cakupan peserta KB Aktif : meningkatnya jangkauan pelayanan peserta KB Aktif per tahun;
9. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I : menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan KS I per tahun (meningkatnya tahapan keluarga);

10. Bina Keluarga Remaja : meningkatnya jumlah kelompok BKR per tahun;
11. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun : menurunnya PUS usia <20 Th per tahun;
12. Meningkatnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang; IUD, Implant, MOP/W) per tahun;
13. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) : menurunnya jumlah remaja ASFR yang melahirkan per tahun;
14. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) : menurunnya persentase WUS yang hamil tidak diinginkan per tahun.

A. REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DARI PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019

Pencapaian kinerja pelayanan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 dengan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Tingkat prevalensi peserta KB Aktif dengan capaian 71,68% atau 57,668 peserta KB aktif dari seluruh PUS 74,399 orang;
2. Tingkat prevalensi kesertaan KB Pria dengan capaian 2,12% atau 747 peserta KB Pria dari seluruh Peserta KB Aktif 57,668 orang;
3. Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan capaian 12,38% atau 74,399 Unmet need dari seluruh PUS <20 Th. 9,012 orang;
4. Total Fertility Rate (TFR) dengan capaian 112,68 atau jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-49 Th) 7,314 WUS selama masa reproduksinya setahun rata-rata 0,10 orang;
5. Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) dengan capaian 28,6% atau 4 buah Kelompok PIK KRR dari 14 Kecamatan;
6. Bina Keluarga Balita (BKB) dengan capaian 98,75% atau 15 buah Kelompok BKB dari 199 Desa/Kelurahan;
7. Rata-rata jumlah anak per keluarga dengan capaian 1,53 rata-rata anak per keluarga atau 145.891 jumlah anak keseluruhan dari 108.453 Keluarga;

8. Cakupan peserta KB Aktif dengan capaian 71,68% atau jangkauan pelayanan pada 57,668 peserta KB aktif dari seluruh PUS 74,399 orang;
9. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dengan capaian 18,01% atau 19.541 Keluarga Pra S dan KS I dari 108.453 Keluarga;
10. Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan capaian 81,40% atau 162 buah Kelompok BKR dari 199 Desa/Kelurahan;
11. Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan capaian 88,94% atau 177 buah Kelompok BKL dari 199 Desa/Kelurahan;
12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun dengan capaian 2,33% atau jangkauan pelayanan pada 1,737 PUS <20 Th dari seluruh PUS <20 Th 74,399 orang;
13. Meningkatnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang; IUD, Implant, MOP/W) per tahun dengan capaian 79,92% atau 53,234 Peserta KB MKJP dari seluruh Peserta KB Aktif 57,668 orang;
14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) dengan capaian 58,6% atau 5.1,16 PUS ASFR dari seluruh PUS 74,399 orang;

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan

Adapun Tantangan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi sebagai berikut :

1. Dalam hal pengendalian penduduk melalui pelaksanaan Program KB menuju keluarga sejahtera belum optimal, hal ini bergantung pada persebaran penduduk tidak merata sehingga tingkat kualitas penduduk dengan status kesehatan, status pendidikan serta angka kemiskinan lebih menumpuk pada suatu Kecamatan tertentu;
2. Masih kurangnya tingkatan pengetahuan dan kesadaran PUS serta Remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi;
3. Masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB;
4. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga;

5. Penyediaan data dan informasi keluarga belum optimal karena belum tersedianya bank data terpadu antara (Disdukcapil, BPS dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) sebagai data basis kependudukan.

Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Adanya PERBUP No.49 Tahun 2016 yang mengatur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas;
2. Dukungan sarana Gedung Kantor yang representative dengan aplikasi kemajuan IT (Informasi Tehnologi) yang memadai;
3. Dukungan sarana kendaraan operasional roda dua bagi PLKB;
4. Dukungan sarana kendaraan operasional roda empat bagi pelayanan KB/KR untuk wilayah sulit dijangkau (MUYAN dan MUPEN);
5. Dukungan Petugas Medis dari Dinkes dan TKST KB Medis yang optimal terhadap pelayanan Program KB di Kecamatan dan Desa;
6. Adanya Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang menggerakkan Program KB di setiap Desa dan Dusun;
7. Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi bagi PUS Keluarga miskin;
8. Adanya reward dari BKKBN Pusat terhadap keberhasilan KDH dalam menggerakkan program pengendalian penduduk melalui KB.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu strategis dapat diartikan sebagai hal-hal yang diperkirakan akan berpengaruh besar dan bersifat positif terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis ini dapat terbentuk dari hasil analisa dan telaahan teoritik berbagai data dan literatur yang ada. Disamping itu isu strategis juga dapat terbentuk dari telaahan faktual.

Berdasarkan asumsi telaahan teoritik dan telaahan faktual tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal pengendalian penduduk melalui pelaksanaan Program KB menuju keluarga sejahtera belum optimal, hal ini bergantung pada persebaran penduduk tidak merata sehingga tingkat kualitas penduduk dengan status kesehatan, status pendidikan serta angka kemiskinan lebih menumpuk pada suatu Kecamatan tertentu sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga bervariasi antar Kecamatan;
2. Masih kurangnya tingkatan pengetahuan dan kesadaran PUS serta Remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi sehingga masih belum meningkatnya Pendewasaan Usia Perkawinan;
3. Masih rendahnya partisipasi pria dalam mendukung program KB;
4. Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga dikarenakan pemberdayaan kelompok ekonomi produktif keluarga masih terkendala pendanaan dan ini berimbas pada turunnya ketahanan keluarga dalam menangkal pengaruh budaya asing yang tidak mendidik;
5. Penyediaan data dan informasi keluarga belum optimal karena belum tersedianya bank data terpadu antara (Disdukcapil, BPS dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) sebagai data basis kependudukan sehingga hasil data yang dikeluarkan masih bersifat ego sektoral untuk kepentingan masing-masing Lembaga/Instansi tersebut.

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 adalah "**MURA SEMPURNA 2021**" "**Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman**".

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Musi Rawas, maka ditetapkan 7 (Tujuh) Misi yaitu :

1. Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
2. Menumbuhkan kembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agro industri komoditi unggulan;
3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani;
4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima;
6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam;
7. Memastikan kondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masuk dalam klasifikasi urusan wajib non-pelayanan dasar.

Adapun Perwujudan Visi dan Misi yang berkaitan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah terletak pada Misi 1, yaitu sebagai berikut :

Misi 1 : Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Menuju Musi Rawas Sehat dan Cerdas.

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas :

Meningkatkan Kondisi Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dengan misi: ¹⁾ Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, ²⁾ Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum, ³⁾ Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, ⁴⁾ Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, ⁵⁾ Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, ⁶⁾ Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan ⁷⁾ Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN diharapkan dapat turut mensukseskan Agenda ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”.

Dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, disebutkan bahwa Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2015-2019 pada point 6 (enam) yaitu : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.

Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, maka telaahan **Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota** dijabarkan dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 khususnya yang berkaitan dengan urusan PD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu : Meningkatkan Kondisi Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dengan meningkatnya Pelaksanaan KB untuk mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk dengan sasaran strategis meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB dengan tujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB dengan indikator sebagai berikut;

Laju Pertumbuhan Penduduk

Penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat berimbas pada terjadinya penurunan angka ketergantungan yang merupakan jendela peluang (*window of opportunity*) untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga jendela peluang tersebut dapat bermanfaat antara lain untuk : (1) meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedianya kesempatan kerja produktif, agar penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan tabungan rumah tangga; (3) diinvestasikannya tabungan rumah tangga untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk memasuki pasar kerja. Di Indonesia, jendela peluang tersebut diperkirakan hanya akan terjadi sekali sepanjang sejarah, dengan periode kejadian yang sangat pendek yaitu pada tahun 2020–2025. Diharapkan pada tahun 2021, Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Musi Rawas dapat menurun menjadi 1,35 (capaian LPP Tahun 2015 1,40).

Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR)

Tingkat prevalensi peserta KB aktif dimaksudkan besaran capaian jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi atau CPR (Contraceptive Prevalence Rate) yang berkisar pada angka 71 persen pada tahun 2016 dan diharapkan meningkat menjadi 72,88 persen pada tahun 2021.

Rasio Antara Kebutuhan KB dan KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Rasio Antara Kebutuhan KB dan KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) dimaksudkan perbandingan antara jumlah wanita yang sudah tidak ingin mempunyai anak atau ingin

menjarangkan kehamilannya sampai dengan 24 bulan dan tidak menggunakan alat kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur yang berkisar pada angka 12,48% pada tahun 2016 (masih diatas nasional 10,48%) dan diharapkan semakin menurun menjadi 9,98% pada tahun 2021.

Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) dimaksudkan jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dengan capaian 2,47 pada tahun 2016 dan diharapkan semakin menurun menjadi 2,37 pada tahun 2021.

Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-49 tahun)

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) dimaksudkan bahwa usia 15-19 tahun tersebut merupakan usia remaja sehingga diharapkan mereka dapat menunda usia perkawinan, dengan capaian 59 pada tahun 2016 dan diharapkan semakin menurun menjadi 49% pada tahun 2021.

Kelahiran pada usia remaja ini masih sering terjadi karena alasan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan remaja sehingga peranan advokasi baik melalui penyuluhan maupun media cetak, elektronik serta media luar ruang sangat perlu dioptimalkan.

Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Dari WUS (15-49 tahun)

Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) dimaksudkan lost control dari WUS yang menganggap bahwa kecil kemungkinan mereka untuk melahirkan dikarenakan alasan antara lain melakukan senggama teputus atau berhenti sejenak menggunakan kontrasepsi karena alasan kesehatan (kegemukan, muncul flek diwajah) atau usia resiko tinggi melahirkan (35 tahun keatas), akhirnya dengan berbagai alasan tersebut tanpa disadari terjadi kehamilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka telaahan **Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota** diselaraskan dengan tujuan utama PD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yaitu urusan pengendalian

penduduk melalui KB dengan cakupan pengendalian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas menuju keluarga sejahtera dan berkualitas yang pada akhirnya bermuara pada tujuan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan urusan pemerintahan daerah pendukungnya yang merupakan amanat MISI 1 (Kesatu) yakni : Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur, menuju MURA SEMPURNA.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Struktur Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas

Dalam konstelasi regional (provinsi) dan sebagaimana yang diamanatkan dalam RT-RW Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kecamatan Muara Beliti sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Ini artinya Kota Lubuklinggau mempunyai kapasitas untuk melayani wilayah Musi Rawas, Empat Lawang dan wilayah lain di sekitarnya.

Mengacu pada kebijakan dan strategi di atas, Muara Beliti diarahkan menjadi PKL untuk wilayah Musi Rawas, selain sebagai pusat pemerintahan. Adapun pusat pertumbuhan lainnya diarahkan sebagai Pusat Pelayanan bagi wilayah belakangnya dengan hirarki sesuai dengan hasil analisis dan hasil kesepakatan pada beberapa kali pertemuan teknis.

Hal penting lain yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan sistem perkotaan Muara Beliti adalah kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJM, yaitu pembangunan akan dilakukan dengan pendekatan agropolitan.

Secara alamiah struktur ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai ciri khas, di mana pusat permukiman tumbuh di sepanjang jalan lintas Sumatera (utara-selatan) dan jalan dari Lubuklinggau menuju Kota Palembang (barat-timur). Terdapat dua kawasan yang membatasi pertumbuhan permukiman, yaitu di bagian barat dibatasi oleh TNKS dan bagian Tenggara dibatasi oleh kawasan hutan (BTS Ulu dan Muara Lakitan bagian selatan).

Dalam kebijakan pembangunannya, Kabupaten Musi Rawas menggunakan konsep pengembangan agropolitan. Di mana struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana

pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Dengan demikian, struktur ruang Musi Rawas direncanakan seperti berikut :

1. PKL; Pusat Kegiatan Lokal adalah Muara Beliti. Peran utama yang akan diemban Muara Beliti adalah sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan agropolitan. Dengan sendirinya Muara Beliti juga akan menjadi simpul pergerakan, pusat jasa dan pelayanan pada skala kabupaten. Namun secara khusus juga akan melayani Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
2. PP 1; Pusat Pelayanan akan dibedakan secara hirarkis menjadi pusat pelayanan kawasan yang akan melayani beberapa kecamatan dan pusat pelayanan lokal yang melayani satu wilayah kecamatan yang juga dikenal dengan ibu kota kecamatan. Adapun yang akan diarahkan menjadi pusat pelayanan kawasan adalah :
 - a. *Simpang Terawas*; adalah pusat permukiman yang berada antara Simpang Nibung Muratara dan Lubuklinggau yang juga berada pada lintas trans Sumatera. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani : Kecamatan Karang Jaya Muratara, Kecamatan STL. Ulu Terawas, Kecamatan Selangit, dan Kecamatan Sumber Harta.
 - b. *Megang Sakti*; diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa kecamatan di sekitarnya, yaitu: Kecamatan Megang Sakti, Purwodadi dan Kecamatan Tugumulyo.
 - c. *Simpang Semambang*; adalah pusat permukiman yang berada pada jalan lintas Lubuklinggau-Palembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani: Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan BTS Ulu, dan Kecamatan Muara Kelingi bagian Selatan.
 - d. *Muara Lakitan*; diarahkan sebagai pusat pelayanan bagi pusat permukiman dalam wilayah kecamatannya sendiri di bagian utara, Kecamatan Muara Kelingi dan kecamatan di bagian barat Kabupaten Musi Banyuasin.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis daerah dalam pembangunan MURA Sempurna "Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman dan Aman", yakni antara lain pada **MISI 1 Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur** yang mengarahkan pada sasaran strategis :

1. Mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, penguatan kurikulum dan pelaksanaannya serta penguatan sistem pelayanan yang komprehensif dan kredibel;
3. Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan Non Formal;
4. Peningkatan pengelolaan dan penempatan guru, fasilitas pengembangan pengetahuan dan karir guru serta jaminan hidup;
5. Percepatan pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia yang berkualitas;
6. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi;
7. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit, peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit;
8. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan melalui peningkatan cakupan kepesertaan Kkarta Indonesia Sehat;
Peningkatan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan
9. Memperkuat Advokasi dan KIE;
10. Penguatan Akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam sistem Jaminan Sosial (SJSN) kesehatan maupun Non SJSN kesehatan;
11. Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga;
12. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja;
13. Penguatan kelembagaan kependudukan dan Keluarga Berencana yang efektif dan menyusun landasan hukum melalui penyerasian kebijakan pembangunan bidang

kependudukan dan KB, serta menguatkan data informasi kependudukan dan Keluarga berencana.

Isu-Isu Strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas

Dalam rangka mendukung isu-isu strategis daerah diatas, maka beberapa isu strategis yang diperkirakan akan menjadi fokus dari program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 2016 – 2021 dalam upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu : jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu;
2. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), pada tahun 2021 diharapkan menurun menjadi 1,35;
3. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);
4. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed);
5. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
6. Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
7. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari WUS (15-49 tahun);
8. Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat;
9. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK KRR/M);
10. Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peningkatan pengetahuan tentang kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
12. Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembnagunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun

4.1.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan pernyataan misi diatas, maka tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas 2016-2021 adalah;

“Meningkatnya pelaksanaan KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk”

4.1.3 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kaupaten Musi Rawas dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran didalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2016-2021 adalah;

“Meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB”

Tabel 4.1.
**Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan								
1	Meningkatnya pelaksanaan KB untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Sasaran								
1.1	Meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB	Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR)	71,38	71,68	71,98	72,28	72,58	72,88
		Angka Kelahiran Kasar (CBR)	-	-	-	20,45	20,0	18,08
1.2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Nilai Sakip DPPKB	BB	BB	BB	BB	70,79	80,62
		Indeks Profesionalisme ASN DPPKB	55	55	55	55	55	65

PROGRAM PRIORITAS	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
URUSAN RUTIN PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH						
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95	95	95	95	95	95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95	95	95	95	95	95
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60	65	70	75	80	85
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98	98	98	98	98	98

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
URUSAN WAJIB NON LAYANAN DASAR							
Program Keluarga Berencana	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	79,90	79,92	79,94	79,96	79,98	80
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 Th (%)	1,86	1,85	1,84	1,83	1,82	1,81
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 tahun)	59	58,6	58,4	58,2	58	57,8
Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	12,48	12,38	12,28	12,18	12,08	11,98
Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian	90	90	92	94	96	98

Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021
 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas
 Tahun 2016-2021

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
URUSAN WAJIB NON LAYANAN DASAR							
	penduduk						
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB (%)	80	81	82	83	84	85
	Cakupan anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) ber-KB	82	83	84	85	86	87

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Berikut beberapa yang menjadi peluang pembangunan pelayanan yang nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan :

1. Adanya PERBUP No. 49 Tahun 2016 yang Mengatur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Kabupaten Musi Rawas;
2. Dukungan Sasaran Gedung Kantor yang Representative dengan aplikasi Kemajuan IT (Informasi Teknologi) yag memadai;
3. Dukungan Sarana Kendaraan Operasional Roda dua bagi PLKB;
4. Dukungan sarana kendaraan operasional roda empat bagi pelayanan KB/KR untuk wilayah sulit dijangkau (MUYAN dan Mupen);
5. Dukungan petugas medis dari Dinkes dan TKST KB Medis yang optimal terhadap pelayanan Program KB di kecamatan dan Desa;
6. Adanya institusi Masyarakat pedesaan (IMP) yang menggerakan program KB disetiap desa dan Dusun;
7. Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pus Keluarga Miskin;
8. Adanya reward dari BKKBN Pusat terhadap Keberhasilan KDH dalam Menggerakan Program Pengendalian Penduduk melalui KB;
9. Pembinaan dan Penggerakan Kampung KB yang telah dibentuk;
10. Penggerakan optimal PKB/PLKB dan petugas lini lapangan lainnya terhadap program KB MKJP.

Sasaran didalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya penyuluhan dan Penggerakan unsur-unsur penunjang Keluarga berencana
2. Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana
3. Meningkatnya Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
4. Meninkatnya Pengendalian penduduk melalui keluarga Berencana
5. Meningkatnya Layanana Administrasi Perkantoran

Adapun Strategi dan Kebijakan Pengendalian Penduduk melalui KB menuju keluarga sejahtera serta diarahkan kepada upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk, yaitu :

1. Meningkatkan advokasi dan KIE kepada masyarakat terhadap program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Memperkuat akses pelayanan KB MKJP dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
3. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan ketahanan keluarga melalui poktan di masyarakat;
4. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga;
5. Memperkuat kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif serta memperkuat data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Memperkuat Pembinaan/Pelestarian kesertaan ber-KB (PA);
7. Memperkuat peran Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali program dan kegiatan di lini lapangan;
8. Pembinaan “Kampung KB”;
9. Peningkatan dukungan Kemitraan dalam penggerakan program dan kegiatan di Lini Lapangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*.

Tiga dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan dimaksud memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP Tahun 2016 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi yang diperlukan tersebut di atas dijabarkan ke dalam 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang.

Adapun isu strategis yang berkenaan dengan BKKBN adalah pada arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui :

- ⇒ Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang diarahkan untuk mengendalikan kuantitas penduduk melalui program kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), meningkatkan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga untuk

mendorong masyarakat Indonesia dalam membentuk keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, pengarahan dan penataan persebaran penduduk, serta penguatan data dan informasi kependudukan dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis bukti.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja. Program-program pembangunan ini meliputi;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, melalui kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- i) Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undang
- j) Penyediaan Makanan dan Minuman
- k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- m) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tekhnis/ Perkantoran
- n) Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, melalui kegiatan:

- a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d) Pengadaan Mebeleur
- e) Pengadaan Komputer PC/Note Book dan kelengkapannya
- f) Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor
- g) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasioanal

- h) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, melalui kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Penyusunan Dokumen dan Regulasi Organisasi Perangkat Daerah
- 5. Program Keluarga Berencana
 - a) Kegiatan Pelayanan KIE
 - c) Pembinaan Keluarga Berencana
 - d) Pengadaan sarana mobilitas Tim KB keliling
 - e) Pendataan Keluarga
 - f) Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB
 - g) Analisa dan evaluasi data hasil pencapaian Program KB
 - h) Penyelenggaraan Manajemen BOKB
- 6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - a) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- 7. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
 - b) Penyelenggaraan Operasional Klinik KB
 - c) Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi
- 8. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
 - a) Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP Program KB
 - b) Pembinaan Kampung KB
 - c) Peringatan Hari Keluarga Nasional
- 9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - a) Pengembangan Bina Keluarga

6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

A. Indikator Kinerja

Dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya cakupan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui KB menuju keluarga sejahtera, maka indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk sebagai berikut :

1. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu : jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu;
2. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);
3. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed);
4. Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB aktif;
5. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
6. Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
7. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari WUS (15-49 tahun);
8. Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat;
9. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK KRR/M);
10. Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peningkatan pengetahuan tentang kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
12. Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).

Dari kedua belas indikator kinerja tersebut, dirangkum menjadi 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang telah mewakili kedua belas indikator kinerja, yaitu;

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)
2. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR)
3. Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (unmet need)
4. Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)
5. Persentase Kehamilan yang Tidak Diinginkan dari WUS (15-49 Tahun)

Adapun jika disinkronkan dengan 9 (sembilan) Rencana Program dan Kegiatan tersebut, maka Indikator Kinerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

(1) Program Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) yang berkualitas, termasuk di dalamnya upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka mencapai sasaran strategis pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui KB menuju keluarga sejahtera dengan tujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

Kegiatan pokok program ini meliputi:

1. Meningkatkan akses informasi serta akses dan kualitas pelayanan KB dan KR khususnya pada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera-1, kelompok rentan, keluarga berpendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar;
2. Meningkatkan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi pada prevalensi peserta KB aktif dan KB Pria;
3. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
4. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) angka kelahiran total pada WUS (Wanita Usia Subur);
5. Menurunkan rata-rata jumlah anak per keluarga;
6. Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif;
7. Meningkatkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun;
8. Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
9. Menurunkan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR);
10. Menurunkan Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

(2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan remaja berkeluarga dalam upaya mendukung peningkatan kualitas generasi mendatang.

Kegiatan pokok program ini meliputi:

1. Menyelenggarakan promosi kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia kawin termasuk advokasi, KIE, dan konseling bagi masyarakat, keluarga, dan remaja melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR).
2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri melalui pengembangan sumber daya manusia (pengelola dan pelaksana) KRR.

(3) Program Pelayanan Kontrasepsi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan Kontrasepsi kepada PUS (Pasangan Usia Subur) dalam upaya mendukung peningkatan kualitas dan akses kemudahan dalam ber-KB.

Kegiatan pokok program ini meliputi:

1. Menyelenggarakan pelayanan kontrasepsi baik secara statis melalui Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) / Klinik KB dan Posyandu di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan maupun secara dinamis melalui kegiatan-kegiatan lintas sektoral seperti : TNI Manunggal KB Kesehatan, Bhakti IBI, Bhakti PKK KB Kesehatan dan kegiatan-kegiatan promosi lainnya.
2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program pelayanan kontrasepsi yang mandiri melalui pengembangan pelayanan kontrasepsi pada Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) atau Klinik KB Swasta.

(4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dalam upaya mendukung pelaksanaan program KB dilapangan.

Kegiatan pokok program ini meliputi:

1. Menyelenggarakan pembinaan peran serta masyarakat baik secara statis melalui penyuluhan rutin oleh KUPT di setiap Kecamatan dan PLKB/PKB, TKST KB di Desa/Kelurahan maupun secara dinamis melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan kegiatan-kegiatan sosialisasi lainnya.
2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pembinaan peran serta masyarakat untuk pengembangan pelayanan KB/KR yang mandiri.

(5) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Program ini bertujuan untuk penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dalam upaya mendukung pelaksanaan program Ketahanan Keluarga.

Kegiatan pokok program ini meliputi:

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina-bina keluarga di masyarakat, yaitu ; BKB, BKR, BKL.
2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyiapan tenaga pendamping kelompok bina-bina keluarga bagi peningkatan ketahanan keluarga menuju keluarga sehat dan sejahtera.

B. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran dari Rencana Program dan Kegiatan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana
 - ✓ Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera-1, kelompok rentan, keluarga berpendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar;
 - ✓ Peserta KB aktif dan Kesertaan Aktif KB Pria;
 - ✓ Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need);

- ✓ Angka Kelahiran Total (TFR) pada WUS pada waktu tertentu;
 - ✓ Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
 - ✓ Keluarga dengan target mempunyai anak rata-rata 2 orang;
 - ✓ Peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP;
 - ✓ Kelompok umur khusus (ASFR) 15-19 tahun;
 - ✓ WUS yang kehamilannya tidak diinginkan karena beberapa alasan;
 - ✓ Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan.
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- ✓ PUS yang mempunyai anak remaja dan remaja itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku mereka tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - ✓ Media sebagai wadah promosi program KRR, seperti media elektronik, media cetak, media luar ruang dan media MUPEN .
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
- ✓ PUS yang dilayani melalui Fasyankes/Klinik KB;
 - ✓ PUS Peserta KB Baru maupun Aktif yang dilayani melalui kegiatan momentum atau kegiatan dari Tim KB Keliling;
 - ✓ Pemenuhan permintaan masyarakat akan penyediaan alat dan obat kontrasepsi setiap tahun;
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri
- ✓ Tokoh Formal dan Informal di masyarakat, seperti TOMA, TOGA, Tokoh Pemuda dan Tokoh lainnya yang berpengaruh di masyarakat;
 - ✓ PPKBD, Sub PPKBD serta Kader Poktan di masyarakat;
 - ✓ Organisasi Masyarakat dan Organisasi/Lembaga Swadaya yang ada di masyarakat.
5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
- ✓ Calon tenaga pendamping aktif yang membina Kelompok Bina Keluarga, seperti BKB, BKR, BKL.

C. Pendanaan Indikatif

Berikut ini Tabel Indikasi program/kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan Tahun 2016-2021 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Indikasi Program/ Kegiatan Prioritas dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016-2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Musi Rawas

NO	PROGRAM PRIORITAS	Pagu Indikatif					
		Dalam Jutaan Rupiah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN RUTIN PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,139	1,220	1,286	1,414	1,556	1,711
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,996	1,231	1,452	1,580	1,723	1,881
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10	73	119	130	143	158
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48	35	40	44	48	53
URUSAN WAJIB							
NON LAYANAN DASAR							
5	Program Keluarga Berencana	1,731	2,210	3,588	3,947	4,342	4,776
6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	117	129	142	156	171	189
7	Program Pelayanan Kontrasepsi	467	487	491	538	590	647
8	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1,000	1,611	3,588	3,947	4,342	4,776
9	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	42	126	193	212	233	256

D. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator

Tabel 5.2 terlampir

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas yang efektif dan efisien dengan pendekatan komprehensif yaitu terletak pada Misi 1 yakni : **Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dengan tujuan Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Menuju Musi Rawas Sehat dan Cerdas**. Sedangkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah **Meningkatkan Kondisi Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB** selama periode tahun 2016-2021.

Langkah-langkah meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB memerlukan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas didalam keluarga-keluarga yang sejahtera dan ini dapat berdampak pada pengurangan cost Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah khususnya pembangunan sumber daya manusia sehingga cost yang tersedia dapat dialihkan untuk pembangunan pada bidang lainnya.

Dalam upaya meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB digunakan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dimaksud diatas, yakni :

1. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu : jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu;
2. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);
3. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed);
4. Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB aktif;

5. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
6. Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
7. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari WUS (15-49 tahun);
8. Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat;
9. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK KRR/M);
10. Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peningkatan pengetahuan tentang kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
12. Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).

Berikut ini ditampilkan tabel indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

Tabel 6.1.
Ketrkaitan Tujuan dan Sasaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016-2021

No.	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD
Misi 1	Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Menuju Musi Rawas Sehat dan Cerdas	Meningkatkan Kondisi Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Kondisi Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui program KB	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,35

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatkan pengendalian penduduk	Rasio wawasan tentang pendidikan kependudukan
2	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Persentase Peserta KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
3	Meningkatnya pembangunan keluarga	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, UPPKS) yang ber-KB

BAB VIII

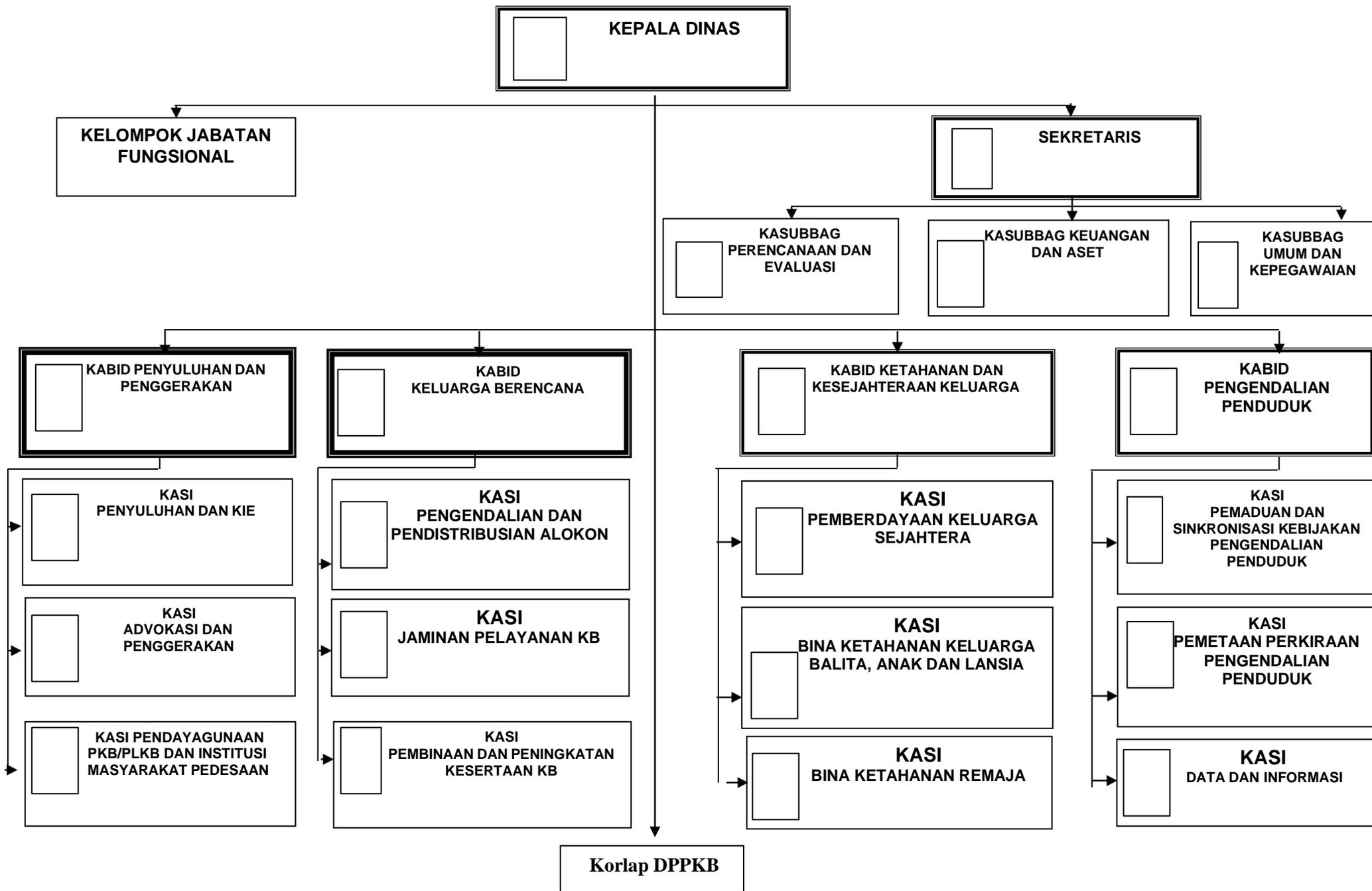
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas ini merupakan sinkronisasi dari Program RPJMN tahun 2015-2019 dan Program dari Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Selatan terutama yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk Melalui KB sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Keluarga Sejahtera.

Rencana Strategis Program Pengendalian Penduduk Melalui KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ini disusun sebagai dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan PERDA Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, Renstra ini juga digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga dari tahun ke tahun dapat disusun suatu rencana yang berkesinambungan, menyeluruh dan konsisten.

Selain itu, Renstra ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk Melalui KB Kabupaten Musi Rawas dan peningkatan kualitas perencanaan dalam kontribusinya untuk mewujudkan visi ” **Meningkatnya Pelaksanaan KB untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk**”.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN MUSI RAWAS**



KorLap (Koordinasi Lapangan) DALDUK KB KECAMATAN :

1. TUGUMULYO : FAISAL ANWAR, S.I.Kom / NIP. 19880217 201502 1 001 / Penata Muda /III.a
2. PURWODADI : RIZA AGUSTINA, S.I,KOM/NIP. 19860217 201101 2 008 / Penata Muda Tk.I /III.b
3. MEGANG SAKTI : ARLINDA, SH / NIP. 19680613 199401 2 002 /Pembina /IV. a
4. SUMBER HARTA : BAMBANG IRAWAN, Amd / NIP. 19660505 199301 1 002 / Penata Tingkat Satu /III.d
5. STL ULU TERAWAS : ENDANG SURYA NENGSI SINAGA, S.Sos / NIP.19840523 201212 2 001 / Penata Muda Tk.I /III.b
6. SELANGIT : SUHAIMI, S.IP / NIP. 19680813 198803 1 001 /Penata Tingkat Satu /III.d
7. MUARA BELITI : YUNITA LULIANA SIAGIAN, S.I.Kom / NIP. 19840410 201502 2 003 / Penata Muda /III.a
8. TPK : MARTINA SETIANDANI, S.I.Kom / NIP. 19830925 201403 2 001 / Penata Muda /III.a
9. JAYALOKA : HARMININGSIH, AM.Keb / NIP. 19671225 198903 2 008 /Penata Tingkat Satu /III.d
10. SUKAKARYA : SITI AISYA / NIP.19680907 199301 2 001 /Penata Tingkat Satu /III.d
11. TUAH NEGERI : SUWARMAN, S.IP /NIP.19820423 200801 1 002 / Penata Muda /III.a
12. MUARA KELINGI : RUSTINI HERAWATI, SKM /NIP. 19710401 199203 2 003 /Penata Tingkat Satu /III.d
13. MUARA LAKITAN : IKA PURWANTI, S.I.Kom / NIP. 19790112 201212 2 001 / Penata Muda /III.a
14. BTS ULU : EDISON, S.Pd / NIP. 19680619 199503 1 001 /Penata Tingkat Satu /III.d

Tabel 5.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR Kinerja, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR
OPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUDAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS

Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi kinerja pada Akhirnya Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI				
							Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program KB	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Target	2		Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																			
			2	14		Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.762.252.000	9.312.252.000	10.243.477.200	11.267.824.920	12.394.607.412	13.634.068.153	13.634.068.153											
			2	14	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.334.755.950	1.334.755.950	1.468.231.545	1.615.054.700	1.776.560.169	1.954.216.186	1.954.216.186											
			2	14	01	201	Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	32.000.000	32.000.000	35.200.000	38.720.000	42.592.000	46.851.200	46.851.200										
			2	14	01	201	01	Penyusunan Renstra dan Renja perangkat Daerah	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	12.100.000	4 Dokumen	13.310.000	4 Dokumen	14.641.000	4 Dokumen	14.641.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
			2	14	01	201	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.500.000	4 Dokumen	6.050.000	4 Dokumen	6.655.000	4 Dokumen	7.320.500	4 Dokumen	7.320.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
			2	14	01	201	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.500.000	4 Dokumen	6.050.000	4 Dokumen	6.655.000	4 Dokumen	7.320.500	4 Dokumen	7.320.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
			2	14	01	201	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.000	1 Tahun	12.000.000	1 Tahun	13.200.000	1 Tahun	14.520.000	1 Tahun	15.972.000	1 Tahun	17.569.200	1 Tahun	17.569.200	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Tercapainya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Target		2	14	01	202	Administrasi Keuangan	60.000.000		60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000		87.846.000				
			2	14	01	202	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		36 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang		36 Orang		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
			2	14	01	202	02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	60.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	66.000.000	10 orang	72.600.000	10 orang	79.860.000	10 orang	87.846.000	10 orang	87.846.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
			2	14	01	202	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	35.600.000	14 Dokumen	35.600.000	14 Dokumen	39.160.000	14 Dokumen	43.076.000	14 Dokumen	47.383.600	14 Dokumen	52.121.960	14 Dokumen	52.121.960	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
Meningkatnya Kinerja Layanan pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran		2	14	01	203	Administrasi Umum	1.142.209.000		1.142.209.000		1.256.429.900		1.382.072.890		1.520.280.179		1.672.308.197		1.672.308.197				
			2	14	01	203	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.062.500	800 surat	2.062.500	800 surat	2.268.750	800 surat	2.495.625	800 surat	2.745.188	800 surat	3.019.706	800 surat	3.019.706	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	

2	14	01	203	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang dibayar	48.510.000	3 Jenis Rekening	48.510.000	3 Jenis Rekening	53.361.000	3 Jenis Rekening	58.697.100	3 Jenis Rekening	64.566.810	3 Jenis Rekening	71.023.491	3 Jenis Rekening	71.023.491	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	01	203	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	11.979.000	4 Jenis	11.979.000	4 Jenis	13.176.900	4 Jenis	14.494.590	4 Jenis	15.944.049	4 Jenis	17.538.454	4 Jenis	17.538.454	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	01	203	04	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan Jasa Penjaga Malam yang terbayar	24.400.000		24.400.000		26.840.000		29.524.000		32.476.400		35.724.040		35.724.040	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	01	203	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayar	20.284.000	63 Unit	20.284.000	63 Unit	22.312.400	63 Unit	24.543.640	63 Unit	26.998.004	63 Unit	29.697.804	63 Unit	29.697.804	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	01	203	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibayar	73.128.000	21 Orang	73.128.000	21 Orang	80.440.800	21 Orang	88.484.880	21 Orang	97.333.368	21 Orang	107.066.705	21 Orang	107.066.705	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	01	203	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa jumlah jenis peralatan Kebersihan Kantor yang dibayar/tersedia	27.718.900	2 Orang, 19 Jenis	27.718.900	2 Orang, 19 Jenis	30.490.790	2 Orang, 19 Jenis	33.539.869	2 Orang, 19 Jenis	36.893.856	2 Orang, 19 Jenis	40.583.241	2 Orang, 19 Jenis	40.583.241	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	01	203	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa															
2	14	01	203	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	53.561.200	50 jenis	53.561.200	50 jenis	58.917.320	50 jenis	64.809.052	50 jenis	71.289.957	50 jenis	78.418.953	50 jenis	78.418.953	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	01	203	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	28.426.200	7 jenis	28.426.200	7 jenis	31.268.820	7 jenis	34.395.702	7 jenis	37.835.272	7 jenis	41.618.799	7 jenis	41.618.799	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	01	203	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor	10.297.300	8 jenis	10.297.300	8 jenis	11.327.030	8 jenis	12.459.733	8 jenis	13.705.706	8 jenis	15.076.277	8 jenis	15.076.277	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	01	203	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
2	14	01	203	15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undang	Jumlah sarana Informasi Media Massa yang berlangganan	37.510.000	33 Jenis	37.510.000	33 Jenis	41.261.000	33 Jenis	45.387.100	33 Jenis	49.925.810	33 Jenis	54.918.391	33 Jenis	54.918.391	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	01	203	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah papan/karangan bunga yang tersedia	28.486.700	5 Jenis	28.486.700	5 Jenis	31.335.370	5 Jenis	34.468.907	5 Jenis	37.915.798	5 Jenis	41.707.377	5 Jenis	41.707.377	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	01	203	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kali Makan Dan Minum Rapat dan tamu yang tersedia	116.547.200	48 Kali dan 10 kali	116.547.200	48 Kali dan 10 kali	128.201.920	48 Kali dan 10 kali	141.022.112	48 Kali dan 10 kali	155.124.323	48 Kali dan 10 kali	170.636.756	48 Kali dan 10 kali	170.636.756	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas

2	14	01	203	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam dan luar Provinsi	219.450.000	17 kali dalam Provinsi, 10 kali luar Provinsi	219.450.000	17 kali dalam Provinsi, 10 kali luar Provinsi	241.395.000	17 kali dalam Provinsi, 10 kali luar Provinsi	265.534.500	17 kali dalam Provinsi, 10 kali luar Provinsi	292.087.950	17 kali dalam Provinsi, 10 kali luar Provinsi	321.296.745	17 kali dalam Provinsi, 10 kali luar Provinsi	321.296.745	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas		
2	14	01	203	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	781.000.000	1 Unit roda empat	7.810.000.000	1 Unit roda empat	8.591.000.000	1 Unit roda empat	9.450.100.000	1 Unit roda empat	10.395.110.000	1 Unit roda empat	11.434.621.000	1 Unit roda empat	11.434.621.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas		
2	14	01	203	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung Kantor yang tersedia	225.000.000	1 Jenis	225.000.000	1 Jenis	247.500.000	1 Jenis	272.250.000	1 Jenis	299.475.000	1 Jenis	329.422.500	1 Jenis	329.422.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas		
2	14	01	203	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang tersedia	32.936.000	5 Jenis	32.936.000	5 Jenis	36.229.600	5 Jenis	39.852.560	5 Jenis	43.837.816	5 Jenis	48.221.598	5 Jenis	48.221.598	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas		
2	14	01	203	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis Mebeleur Knator yang tersedia	452.540.000	5 Jenis	452.540.000	5 Jenis	497.794.000	5 Jenis	547.573.400	5 Jenis	602.330.740	5 Jenis	662.563.814	5 Jenis	662.563.814	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas		
2	14	01	203	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis Pemeliharaan Gedung Kantor yang tersedia	16.500.000	1 Unit	16.500.000	1 Unit	18.150.000	1 Unit	19.965.000	1 Unit	21.961.500	1 Unit	24.157.650	1 Unit	24.157.650	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas		
2	14	01	203	30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasioanal	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Dua yang terpelihara	175.516.000	7 Unit Kend.Roda 4 (Empat), 56 Unit Kend.Roda 2 (Dua)	175.516.000	7 Unit Kend.Roda 4 (Empat), 56 Unit Kend.Roda 2 (Dua)	193.067.600	7 Unit Kend.Roda 4 (Empat), 56 Unit Kend.Roda 2 (Dua)	212.374.360	7 Unit Kend.Roda 4 (Empat), 56 Unit Kend.Roda 2 (Dua)	233.611.796	7 Unit Kend.Roda 4 (Empat), 56 Unit Kend.Roda 2 (Dua)	256.972.976	7 Unit Kend.Roda 4 (Empat), 56 Unit Kend.Roda 2 (Dua)	256.972.976	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas		
2	14	01	203	32	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	15.000.000	3 Jenis	15.000.000	3 Jenis	16.500.000	3 Jenis	18.150.000	3 Jenis	19.965.000	3 Jenis	21.961.500	3 Jenis	21.961.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas		
2	14	01	203	34	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpelihara	11.275.000	28 Jenis	11.275.000	28 Jenis	12.402.500	28 Jenis	13.642.750	28 Jenis	15.007.025	28 Jenis	16.507.728	28 Jenis	16.507.728	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas		
Meningkatkan ya Profesionalisme ASN	Tercapainya Cakupan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2	14	02	204	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.546.950	100.546.950		110.601.645		121.661.810		133.827.990		147.210.789		147.210.789	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas			
		2	14	02	204	01	Pengadaan Mesir/Kartu absensi																
		2	14	02	204	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	48.400.000	3 Orang PNS	48.400.000	3 Orang PNS	53.240.000	3 Orang PNS	58.564.000	3 Orang PNS	64.420.400	3 Orang PNS	70.862.440	3 Orang PNS	70.862.440	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
		2	14	02	204	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	52.146.950	3 Orang PNS	52.146.950	3 Orang PNS	57.361.645	3 Orang PNS	63.097.810	3 Orang PNS	69.407.590	3 Orang PNS	76.348.349	3 Orang PNS	76.348.349	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas

2	14	03	202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		3.335.980.000		3.335.980.000		3.669.578.000		4.036.535.800		4.440.189.380		4.884.208.318		4.884.208.318			
2	14	03	202	02	Penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	Jumlah pengadaan PKB/PLKB Kit yang tersedia	700.000.000	50 Set	700.000.000	50 Set	770.000.000	50 Set	847.000.000	50 Set	931.700.000	50 Set	1.024.870.000	50 Set	1.024.870.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	03	202	03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga Penyuluh lapangan KB yang dibina	1.203.180.000	130 Orang	1.203.180.000	130 Orang	1.323.498.000	130 Orang	1.455.847.800	130 Orang	1.601.432.580	130 Orang	1.761.575.838	130 Orang	1.761.575.838	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	03	202	04	Penggerakan Kader institusi masyarakat (IMP)	Jumlah Kader yang Mendapat honor persiapan Program KKBPK Berbasis data dan pelaksanaan KIE	1.432.800.000	707 Orang	1.432.800.000	707 Orang	1.576.080.000	707 Orang	1.733.688.000	707 Orang	1.907.056.800	707 Orang	2.097.762.480	707 Orang	2.097.762.480	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	03	203		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		274.460.730		274.460.730		301.906.803		332.097.483		365.307.232		401.837.955		401.837.955		
2	14	03	203	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas kesehatan, Jaringan dan Jejaring yang Menerima Pendistribusian alkon	82.440.000	26 Faskes	82.440.000	26 Faskes	90.684.000	26 Faskes	99.752.400	26 Faskes	109.727.640	26 Faskes	120.700.404	26 Faskes	120.700.404	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	03	203	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Kasus Komplikasi Kontrasepsi yang ditangani	10.337.030	15 Kasus	10.337.030	15 Kasus	11.370.733	15 Kasus	12.507.806	15 Kasus	13.758.587	15 Kasus	15.134.446	15 Kasus	15.134.446	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	03	203	06	Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan KB yang tersedia	64.269.000	26 Faskes	64.269.000	26 Faskes	70.695.900	26 Faskes	77.765.490	26 Faskes	85.542.039	26 Faskes	94.096.243	26 Faskes	94.096.243	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	03	203	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB						-		-		-		-		-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																
2	14	03	203	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Kali Kegiatan pelayanan Muyan/faskes KB dan Kegiatan Medis Operasi	181.683.700	89 kali	181.683.700	89 kali	199.852.070	89 kali	219.837.277	89 kali	241.821.005	89 kali	266.003.105	89 kali	266.003.105	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas

		2	14	03	204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		1.209.604.000		1.209.604.000		1.330.564.400		1.463.620.840		1.609.982.924		1.770.981.216		1.770.981.216			
		2	14	03	204	03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kali pertemuan/rapat koordinasi kegiatan di kampung KB	1.085.891.500	240 kali	1.085.891.500	240 kali	1.194.480.650	240 kali	1.313.928.715	240 kali	1.445.321.587	240 kali	1.589.853.745	240 kali	1.589.853.745	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
		2	14	03	204	04 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	123.712.500	25 kampung KB	123.712.500	25 kampung KB	136.083.750	25 kampung KB	149.692.125	25 kampung KB	164.661.338	25 kampung KB	181.127.471	25 kampung KB	181.127.471	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
Meningkatnya kualitas Layanan Kesehatan	1. Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	2	14	04		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		779.202.820		779.202.820		857.123.102		942.835.412		1.037.118.953		1.140.830.849		1.140.830.849			
		2	14	04	201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		779.202.820		779.202.820		857.123.102		942.835.412		1.037.118.953		1.140.830.849		1.140.830.849			
		2	14	04	201	02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah unit pengadaan BKB Kit, BKL Kit, dan UPPKS yang tersedia	730.752.770	25 Unit	730.752.770	25 Unit	803.828.047	25 Unit	884.210.852	25 Unit	972.631.937	25 Unit	1.069.895.131	25 Unit	1.069.895.131	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
		2	14	04	201	04 Orientasi/Pealihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta pelatihan /Pembinaan Kelompok Kegiatan	48.450.050	560 Orang	48.450.050	560 Orang	53.295.055	560 Orang	58.624.561	560 Orang	64.487.017	560 Orang	70.935.718	560 Orang	70.935.718	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
		2	14	04	202	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		-		-		-		-		-		-		-			
		2	14	04	202	03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan mitra	87.576.500	560 Orang	87.576.500	560 Orang	96.334.150	560 Orang	105.967.568	560 Orang	116.564.322	560 Orang	128.220.754	560 Orang	128.220.754	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	
		2	14	04	202	04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja			560 Orang	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab Musi Rawas	Kab. Musi Rawas												

Muara Beliti, Januari 2020
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS

Drs. SUPARDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 19680205 199401 1 001

